

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002), kinerja keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan tugasnya dalam pengelolaan anggaran yang berbasis pada prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator mengukur keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurut Patarai (2018: 258), kinerja keuangan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja keuangan daerah juga berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah, termasuk perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, serta pengawasan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dengan baik, menjaga keseimbangan anggaran, dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik akan berdampak langsung pada kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2005: 274).

Kinerja keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rinova & Dewi, 2021) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing. Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang melakukan

pemeriksaan di seluruh instansi di Indonesia setiap tahun, menunjukkan kinerja keuangan pemerintah. Tantangan yang terkait dengan Kinerja keuangan daerah diantaranya ketergantungan pada dana transfer, dimana banyak daerah masih bergantung pada dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Selain itu problem Kapasitas Sumber Daya Manusia, pegawai daerah sering kali kurang memahami aspek teknis keuangan, seperti penyusunan anggaran berbasis kinerja atau pengelolaan risiko keuangan. Dalam hal ini literasi keuangan merupakan salah satu factor ikut menentukan kinerja keuangan daerah. Rendahnya Literasi Keuangan, lemahnya pemahaman tentang pengelolaan dan analisis keuangan menyebabkan keputusan yang kurang optimal dalam alokasi anggaran.

Thaler dan Sunstein (2008) dalam *Nudge Theory* menyatakan bahwa keputusan keuangan sering kali dipengaruhi oleh bias kognitif, dan literasi keuangan dapat membantu mengurangi dampak negatifnya. Individu yang memiliki literasi keuangan yang baik, akan memahami bias perilaku, seperti *overconfidence* atau *loss aversion*, sehingga mereka dapat membuat keputusan keuangan yang lebih rasional. Dalam artian bahwa dengan literasi yang baik, individu atau organisasi lebih mampu menghindari jebakan perilaku keuangan yang merugikan.

Pada prinsipnya, literasi keuangan mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap kondisi keuangan serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis dalam hal keuangan dan pengelolaan yang lebih baik bagi pemilik usaha maupun organisasi publik (Hidayatulloh, 2020). Pemahaman yang baik tentang konsep keuangan memungkinkan pegawai dan pengambil keputusan di sektor publik untuk mengelola anggaran secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan memperkuat literasi keuangan, organisasi publik dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat sekaligus memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Faktor lainnya yaitu inklusi keuangan. Septiani (2020), mengemukakan bahwa “Inklusi keuangan memiliki tujuan yaitu mendorong pertumbuhan inklusif melalui penurunan angka kemiskinan, peningkatan pembangunan atau pemerataan distribusi keuangan, serta peningkatan stabilitas sistem keuangan. Inklusi keuangan merupakan kegiatan untuk menghapuskan segala bentuk hambatan berupa harga mau pun non-harga pada akses layanan keuangan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Selain inklusi keuangan, faktor *Locus Of Control* menjadi salah satu variable yang mempengaruhi kinerja keuangan institusi public. Di lembaga pemerintahan seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, locus of control dapat memengaruhi cara pegawai dalam mengelola Anggaran. Pegawai dengan internal locus of control lebih mampu memastikan anggaran digunakan sesuai rencana strategis dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal pelaporan keuangan, individu yang memiliki locus of control yang baik akan membantu mereka lebih disiplin dalam menyusun laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Internal locus of control mendorong pegawai untuk mencari cara baru dalam meningkatkan efisiensi keuangan dan mengurangi pemborosan. Intinya *locus of control* merupakan keyakinan bahwa seseorang mampu mengendalikan peristiwa dan konsekuensi yang mempengaruhi hidup seseorang (Fitroh, 2019).

Provinsi Sulawesi Barat, sebagai daerah dengan potensi pembangunan yang besar, menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran yang sering kali tidak

optimal. Hal ini berpengaruh pada keterlambatan pelaksanaan program pembangunan daerah. Kurangnya literasi keuangan dan akses ke layanan keuangan di level pemerintahan sering kali menjadi penyebab rendahnya kinerja keuangan. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi yang baik dalam pengelolaan anggaran. Akuntabilitas keuangan juga menjadi sorotan karena pengawasan publik terhadap lembaga pemerintahan semakin meningkat.

Penelitian ini menjadi penting karena Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memainkan peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga penguatan kinerja keuangan akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan efisien di Sulawesi Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah literasi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bapperida Provinsi Sulawesi Barat.
2. Apakah Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bapperida Provinsi Sulawesi Barat.
3. Apakah locus of control berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bapperida Provinsi Sulawesi Barat?
4. Apakah literasi Keuangan, inklusi keuangan dan locus of control berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Bapperida Provinsi Sulawesi Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaruh literasi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Bapperida Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Bapperida Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pengaruh *locus of control* terhadap Kinerja Keuangan Bapperida Provinsi Sulawesi Barat.
4. Pengaruh simultan literasi Keuangan, inklusi keuangan dan *locus of control* terhadap Kinerja Keuangan Bapperida Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Praktis

1. Kontribusi pada Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini memperkaya literatur akademik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan, khususnya dalam konteks literasi keuangan, inklusi keuangan, dan locus of control. Hal ini dapat menjadi referensi bagi peneliti di bidang ekonomi, manajemen keuangan, dan kebijakan publik.

1. Penguatan Teori yang Ada

- Penelitian ini mendukung teori bahwa literasi keuangan memengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan.
- Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana locus of control internal berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

- Penelitian ini mendukung pentingnya akses ke layanan keuangan dalam meningkatkan kinerja keuangan individu atau organisasi.

2. Referensi untuk Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan model penelitian serupa dengan variabel lain atau dalam konteks organisasi yang berbeda, baik di sektor publik maupun swasta.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Meningkatkan Kinerja Keuangan di Organisasi Publik

- Bagi BAPPERIDA, Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya literasi keuangan, akses ke layanan keuangan (inklusi), dan sikap *locus of control* dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan instansi pemerintah.
- Penemuan ini dapat digunakan untuk mendesain program pelatihan atau kebijakan yang meningkatkan pemahaman keuangan di kalangan pegawai.

2. Rekomendasi Kebijakan Keuangan

- Memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang pentingnya memperluas akses layanan keuangan, khususnya bagi pegawai dan masyarakat di tingkat daerah.
- Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mendesain sistem rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi yang mempertimbangkan literasi keuangan dan locus of control individu.

3. Meningkatkan Kesadaran Pegawai akan Literasi Keuangan

Dengan meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan dan locus of control, pegawai dapat mengelola anggaran lebih efektif, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan akuntabilitas.

4. Peningkatan Layanan Publik

Efektivitas kinerja keuangan di instansi pemerintah seperti BAPPERIDA berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap isi dari penelitian ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,

Berisi bagaimana latar belakang masalah yang terjadi sehingga diangkat menjadi objek penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka,

Membahas tentang landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis dalam menganalisis hasil penelitian - penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis sebagai pernyataan akurat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Bab III Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian,

Bab ini menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

Bab IV Metode Penelitian,

Membahas variabel penelitian, definisi optimal yang dapat memberikan deskripsi tentang variable-variabel yang dapat digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel penelitian serta darimana data tersebut diperoleh, metode pengumpulan data dan menjelaskan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, metode analisis yang berisi instrument penelitian yang digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis.

Bab V Hasil Penelitian,

Mendeskripsikan obyek penelitian dan menyajikan data - data deskripsi hasil analisis statistik yang telah dilakukan.

Bab VI Pembahasan,

Membahas hasil - hasil penelitian yang telah diteliti.

Bab VII penutup,

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1 Grand Theory: Resource-Based View (RBV)

Teori RBV, yang diperkenalkan oleh Jay Barney (1991), menyatakan bahwa keunggulan kompetitif dan kinerja organisasi yang berkelanjutan bergantung pada pengelolaan sumber daya internal yang dimiliki organisasi. Sumber daya ini mencakup aset berwujud dan tidak berwujud yang memenuhi kriteria VRIN:

- **Valuable (Bernilai):**

Sumber daya yang memungkinkan organisasi menerapkan strategi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

- **Rare (Langka):**

Sumber daya yang tidak dimiliki oleh banyak pesaing.

- **Inimitable (Sukar Ditiru):**

Sumber daya yang sulit atau mahal untuk ditiru oleh pesaing.

- **Non-substitutable (Tidak Tergantikan):**

Sumber daya yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain yang serupa.

Dalam konteks sektor publik, seperti BAPPERIDA, penerapan RBV membantu memahami bagaimana pengelolaan sumber daya internal dapat meningkatkan kinerja organisasi.

1. Literasi Keuangan sebagai Aset Tidak Berwujud

Literasi keuangan mencerminkan pengetahuan dan pemahaman individu dalam mengelola keuangan. Dalam RBV, literasi keuangan merupakan aset tidak berwujud yang bernilai dan langka, karena tidak semua individu memiliki tingkat literasi yang tinggi. Pengelolaan literasi keuangan yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di BAPPERIDA.

2. Inklusi Keuangan sebagai Akses terhadap Sumber Daya

Inklusi keuangan mencerminkan akses individu atau organisasi terhadap layanan keuangan formal. Dalam RBV, inklusi keuangan merupakan sumber daya yang bernilai karena memungkinkan organisasi mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan untuk mendukung operasional dan perencanaan keuangan.

3. Locus of Control sebagai Kapabilitas Individu

Locus of control, khususnya internal, mencerminkan keyakinan individu bahwa mereka memiliki kontrol atas hasil dari tindakan mereka. Dalam RBV, ini merupakan kapabilitas individu yang tidak berwujud namun bernilai, karena individu dengan locus of control internal cenderung lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam pengelolaan tugas, termasuk pengelolaan keuangan.

Implikasi teori terhadap Kinerja Keuangan BAPPERIDA

Dengan mengelola dan mengembangkan sumber daya internal seperti literasi keuangan, inklusi keuangan, dan locus of control, BAPPERIDA dapat meningkatkan kinerja keuangannya. Penguatan sumber daya ini dapat dilakukan melalui pelatihan, peningkatan akses terhadap layanan keuangan, dan

pengembangan budaya organisasi yang mendukung proaktivitas dan tanggung jawab individu.

2.1.2 Literasi Keuangan

2.1.2.1 Defenisi Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan suatu kebutuhan yang perlu dimiliki oleh setiap individu untuk meningkatkan pengambilan keputusan keuangan dan pengelolaan keuangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Menurut Mu'at (Putri & Syarifah, 2018:1) menyatakan bahwa “Literasi keuangan itu sendiri dapat terjadi apabila seseorang memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai suatu tujuan, tetapi masih banyak kita temukan orang yang tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik dan membuat keputusan untuk kesejahteraan ekonomi karena kurangnya pengetahuan tentang konsep keuangan”. Sedangkan menurut Safitri & Wahyudi (2022:1658) “Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan”

C. Aprea et al., (Fauziyah et al., 2020:12) yang menyatakan bahwa “Literasi keuangan merupakan salah satu bagian dari kesehatan keuangan yang menggambarkan pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan pribadi”. Menurut Fitriarianti (Pohan et al., 2021:405) “Literasi keuangan (*financial literacy*) merupakan suatu keharusan bagi tiap individu agar terhindar dari masalah keuangan karena individu sering kali dihadapkan pada trade off yaitu situasi di mana seseorang harus mengorbankan salah satu kepentingan demi kepentingan lainnya”. Menurut OJK 2017 (Nusa & Martfiyanto, 2021:228) “Literasi

keuangan adalah sikap (*atttude*) dan perilaku (*behavior*) yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan (*knowledge*) keterampilan (*skill*), keyakinan (*confidence*) masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan yang tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga keuangan, melainkan perilaku masyarakat yang dapat dirubah dan diperbaiki terkait produk dan jasa keuangan”. Literasi keuangan ini bukan hanya tentang pengetahuan keuangan saja melainkan mencakup kemampuan atau keterampilan individu dalam mengelola keuangan. Menurut Yunita (2020:3) “Literasi keuangan diartikan sebagai kecerdasan juga kemampuan individu dalam mengelola keuangan”. Menurut Surendar & Sarma (Kurniawan et al., 2022:79) “Literasi keuangan adalah kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola keuangan sumber daya secara efektif untuk kesejahteraan finansial seumur hidup”

Dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan suatu pengetahuan keuangan yang dimiliki individu dan keterampilanya memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam mengelola keuangan dan pengambilan keputusan keuangan agar terhindar dari masalah keuangan dan meningkatkan kesejahteraan individu.

2.1.2.2 Tujuan Literasi Keuangan

Berdasarkan otoritas jasa keuangan 2017 (Yuwan Lestari, 2020:75) “Tujuan dari literasi keuangan adalah melakukan edukasi dibidang keuangan kepada seluruh masyarakat indonesia supaya dapat mengelola keuangan dengan cerdas dan menaikan akses informasi dan penggunaan produk dan jasa keuangan dengan melibatkan infrastruktur pendukung literasi keuangan”. Menurut Vitt et al., (Koto, 2021:646) literasi keuangan menunjukan kemampuan dalam memilih

secara bijaksana beragam pilihan pengelolaan keuangan serta dapat dengan nyaman mendiskusikan berbagai kondisi atau hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan permasalahan ekonomi lainnya. Tujuannya agar dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dan memiliki kesejahteraan finansial di masa depan.

Adapun faktor yang mempengaruhi literasi keuangan menurut Monticone (Wijayanti et al., 2016:88) antara lain:

1. Karakteristik demografi
2. Latar belakang keluarga
3. Kekayaan
4. Preferensi waktu.

Menurut Darmawan & Pratiwi (2020:33) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan keuangan keluarga
2. Pembelajaran keuangan di perguruan tinggi
3. Sikap keuangan

2.1.2.3 Indikator literasi Keuangan

Indikator literasi keuangan dibagi menjadi dua yakni tahap dasar dan tahap lanjutan. Indikator literasi keuangan tahap dasar meliputi pengetahuan seputar perhitungan matematika, tingkat suku bunga, inflasi, nilai waktu uang, dan tipuan nilai uang.

Indikator literasi keuangan tahap lanjutan meliputi pengetahuan tentang pasar saham dan fungsinya, reksadana, tingkat suku bunga acuan dan keterkaitan dengan obligasi, perusahaan pengolah keuangan, pengetahuan risiko finansial, serta diversifikasi risiko. Oseifuah dalam jurnal *Financial Literacy and Youth*

Entrepreneurship in South (2010) menuliskan tiga indikator literasi keuangan sebagai berikut:

1. *Financial knowledge*

Indikator literasi keuangan yang pertama adalah *financial knowledge*. Indikator ini mengukur pengetahuan seputar terminologi-terminologi keuangan seperti tingkat suku bunga bank, kartu kredit, pasar saham, hingga berbagai layanan jasa perbankan.

2. *Financial attitudes*

Indikator literasi finansial yang kedua adalah *financial attitudes*. Ini mengukur minat dan keterikatan dalam memperbaiki pengetahuan keuangan, merencanakan program keuangan pensiun, hingga menjalankan kebijakan pemerintah dalam pajak.

3. *Financial behavior*

Indikator literasi finansial yang ketiga, *financial behavior*, berorientasi untuk *spending and saving*, mencatat dan menyimpan catatan keuangan pribadi, serta mengelola utang dan kredit sesuai *cash flow* perusahaan.

2.1.3 Inklusi Keuangan

2.1.3.1 Defenisi Inklusi Keuangan

Istilah inklusi keuangan merupakan istilah yang populer dikalangan masyarakat sebagai kontribusi keuangan untuk pembangunan berkelanjutan, akan tetapi tidak banyak yang paham akan istilah ini. Padahal dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari sudah melakukan banyak kegiatan yang merupakan bagian dari inklusi keuangan. Menurut Durai & Stella (2019:122) inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai “Proses memastikan akses layanan keuangan dan

kredit yang dapat diakses oleh golongan lemah dan berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau”.

Septiani, (2020) mengatakan “Inklusi keuangan memiliki tujuan yaitu mendorong pertumbuhan inklusif melalui penurunan angka kemiskinan, peningkatan pembangunan atau pemerataan distribusi keuangan, serta peningkatan stabilitas sistem keuangan. Inklusi keuangan merupakan kegiatan untuk menghapuskan segala bentuk hambatan berupa harga mau pun non-harga pada akses layanan keuangan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya. Tolak ukur inklusi keuangan diketahui dari kepemilikan rekening tabungan, asuransi, jasa pembayaran, dan kredit dari lembaga keuangan non-formal”. Menurut (Soetiono, 2018) inklusi keuangan adalah seluruh upaya dalam meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat didalam pemanfaatan layanan jasa keuangan dengan biaya terjangkau.

Menurut World Bank (2014:1) “Inklusi keuangan merupakan kemampuan individu atau kelompok yang dapat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan”. Layanan yang dimaksud tersebut formal yang bermanfaat dan terjangkau, serta mampu memenuhi kebutuhan mereka, seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Gerdeva & Rhyne (2011:6) mendefinisikan “Inklusi keuangan merupakan kondisi pada saat seluruh masyarakat memiliki akses produk dan layanan jasa keuangan”. Wahid (2014:54) mendefenisikan *financial inclusion* merupakan “rencana pembiayaan inklusif yang tujuan utamanya memberikan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah”.

Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia definisi inklusi keuangan mengacu pada tiga teori lembaga yaitu *The Consultative Group to Assist the Poor-Global Partnership for Financial Inclusion (CGAP-GPFI)*, *Financial Action Task Force (FATF)* dan *Reserve Bank of India*. *CGAP-GPFI* mendefinisikan inklusi keuangan yaitu suatu kondisi di mana semua orang dewasa usia kerja memiliki akses efektif terhadap layanan kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan formal. Akses yang efektif melibatkan pemberian layanan yang nyaman dan bertanggung jawab dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat dan berkelanjutan bagi penyedia dengan hasil bahwa masyarakat yang dikecualikan secara finansial menggunakan layanan keuangan formal daripada opsi informal.

Inklusi keuangan menurut FATF (The Financial Action Task Force, 2011:12)

“Financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector”

yaitu tersedianya akses ke berbagai layanan keuangan dengan aman, nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan menurut Reserve Bank of India (RBI, 2016:1) inklusi keuangan didefinisikan:

“Process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker sections and low-income groups in particular, at an affordable cost in a fair and transparent manner by regulated, mainstream institutional players”

yaitu proses memastikan akses ke produk dan layanan keuangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat khususnya kelompok berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau secara adil dan transparan oleh pelaku kelembagaan. Dalam konteks meningkatkan kinerja keuangan

daerah, maka Inklusi keuangan memastikan aksesibilitas layanan keuangan yang mendukung pengelolaan anggaran secara efisien.

2.1.3.2 Tujuan Inklusi Keuangan

Dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi konsumen atau masyarakat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 76/POJK.07/2016 pasal 12 tujuan inklusi keuangan meliputi:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan pelaku usaha jasa keuangan.
- b. Meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- c. Meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
- d. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Tujuan inklusi keuangan tersebut dapat tercapai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif “keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan 11 antar individu dan antar daerah dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat”. Untuk mencapai Strategi Nasional Keuangan Inklusif terdapat kebijakan yang

mencakup pilar dan fondasi SNKI yang didukung koordinasi antar kementerian/lembaga atau terkait serta dilengkapi dengan aksi keuangan inklusif

2.1.3.3 Indikator Inklusi Keuangan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 (Perpres SNKI, 2020:12) indikator keuangan inklusif dikelompokkan menjadi tiga jenis dimensi berikut:

- a. Jangkauan, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dari aspek keterjangkauan fisik dan biaya.
- b. Penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan.
- c. Kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Indikator inklusi keuangan dapat disesuaikan dengan konteks Lembaga pemerintah. Berikut ini beberapa indikator inklusi keuangan dalam konteks Lembaga pemerintahan:

1. Akses ke Layanan Keuangan

Mengukur sejauh mana lembaga memiliki kemudahan untuk mengakses produk dan layanan keuangan formal:

- Keberadaan dan penggunaan rekening bank resmi untuk transaksi operasional.
- Ketersediaan fasilitas pembayaran elektronik seperti internet banking atau e-wallet.
- Ketersediaan akses pembiayaan untuk mendukung program pembangunan.

2. Penggunaan Layanan Keuangan

Mengukur sejauh mana lembaga menggunakan layanan keuangan untuk pengelolaan anggaran dan operasional:

- Tingkat digitalisasi keuangan, misalnya persentase transaksi non-tunai.
- Pengelolaan dana berbasis anggaran melalui sistem keuangan formal.
- Tingkat pemanfaatan fasilitas pinjaman atau dana cadangan dari lembaga keuangan formal untuk mendukung proyek strategis.

3. Ketersediaan Infrastruktur Keuangan

Mengukur kelengkapan infrastruktur yang mendukung inklusi keuangan lembaga:

- Sistem pencatatan keuangan yang terintegrasi (misalnya, penggunaan aplikasi atau perangkat lunak akuntansi).
- Kemudahan akses ke layanan perbankan digital, seperti aplikasi mobile untuk pengelolaan anggaran.
- Fasilitas layanan keuangan yang mendukung efisiensi operasional, seperti kartu kredit korporasi atau manajemen kas.

4. Literasi dan Kompetensi Keuangan Internal

Mengukur pemahaman dan kemampuan staf Bapperida dalam memanfaatkan layanan keuangan untuk mendukung kinerja:

- Tingkat literasi staf terhadap layanan keuangan yang tersedia.
- Frekuensi pelatihan atau edukasi keuangan internal yang diberikan kepada staf.
- Keterampilan dalam menggunakan teknologi finansial untuk pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.

5. Kesesuaian dengan Kebijakan Pemerintah

Mengukur inklusi keuangan dalam kaitannya dengan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah:

- Kepatuhan terhadap regulasi keuangan formal, seperti penggunaan rekening kas umum daerah (RKUD).

- Integrasi dengan sistem keuangan daerah (Simda) untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan.
- Penerapan layanan keuangan berbasis digital sesuai arahan pemerintah pusat.

Indikator inklusi keuangan ini dapat dihubungkan dengan kinerja keuangan Bapperida melalui efisiensi pengelolaan dana, transparansi anggaran, dan kemampuan lembaga dalam mendukung program pembangunan melalui pemanfaatan layanan keuangan formal secara optimal.

2.1.4 Locus of Control

2.1.4.1 Defenisi Locus of Control

Menurut Darmawan, dkk, (2021) *locus of control* didefinisikan sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa dirinya yang mengendalikan dirinya sendiri atas apa yang mereka kehendaki, tetapi juga tidak sepenuhnya bergantung pada tindakannya seperti nasib, keberuntungan, kesempatan dan takdir. Menurut (Suherlan, 2022) *locus of control* adalah keyakinan diri sendiri terhadap semua yang terjadi merupakan kehendak atas kendali diri. *Locus of control*, atau persepsi individu terhadap kendali atas kesuksesan mereka, dapat memengaruhi bagaimana pengambil keputusan mengelola sumber daya keuangan.

Locus Of Control merupakan keyakinan bahwa seseorang mengendalikan peristiwa dan konsekuensi yang mempengaruhi hidup seseorang (Fitroh, 2019). Menurut (Darmawan, dkk, 2021) *locus of control* didefinisikan sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa dirinya yang mengendalikan dirinya sendiri atas apa yang mereka kehendaki, tetapi juga tidak sepenuhnya bergantung pada tindakannya seperti nasib, keberuntungan, kesempatan dan takdir. Menurut

(Suherlan, 2022) locus of control adalah keyakinan diri sendiri terhadap semua yang terjadi merupakan kehendak atas kendali diri.

Menurut Lefcourt (1982), Locus of control adalah persepsi seseorang terhadap sumber penyebab dari peristiwa-peristiwa yang mereka alami, apakah berasal dari dalam dirinya (internal) atau dari luar dirinya (eksternal). Ini memengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi kehidupan. Spector (1988) mendefinisikan Locus of control sebagai suatu kecenderungan individu untuk percaya bahwa mereka dapat memengaruhi hasil-hasil dalam hidup mereka melalui kemampuan dan upaya mereka sendiri (internal) atau bahwa hasil tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol. Sementara Judge et al. (1998) mengemukakan bahwa Locus of control adalah bagian dari **core self-evaluations**, yaitu cara seseorang mengevaluasi dirinya sendiri dan dunia sekitarnya, yang memiliki implikasi penting pada bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan dan memandang keberhasilan atau kegagalan.

Keterkaitan Locus of Control terhadap Kinerja Keuangan Daerah dapat dianalisis melalui cara individu atau kelompok pengelola keuangan daerah (seperti di Bapperida) memandang kontrol atas hasil keuangan dan pengelolaan anggaran.

1. Internal Locus of Control dan Kinerja Keuangan Daerah

- Keyakinan akan Pengaruh Tindakan Sendiri

Pegawai atau pengelola keuangan daerah yang memiliki internal locus of control percaya bahwa keberhasilan dalam mengelola anggaran daerah sangat bergantung pada upaya, keterampilan, dan keputusan mereka sendiri. Adapun implikasinya pada Kinerja Keuangan Daerah:

- Mendorong perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih cermat.

- Lebih proaktif dalam mencari solusi untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan keuangan.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan.
- Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan
Mereka cenderung terbuka terhadap inovasi, seperti mengadopsi teknologi keuangan baru (e-budgeting), yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2. External Locus of Control dan Kinerja Keuangan Daerah

- Ketergantungan pada Faktor Eksternal
Pegawai dengan external locus of control cenderung percaya bahwa hasil kinerja keuangan daerah lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah pusat, keberuntungan, atau perubahan ekonomi makro. Dampak pada Kinerja Keuangan Daerah:
 - Mengurangi inisiatif dalam mengambil keputusan strategis.
 - Potensi untuk menyalahkan faktor eksternal atas kegagalan, alih-alih mengevaluasi atau memperbaiki proses internal.
 - Rentan terhadap pengabaian tanggung jawab individu dalam manajemen anggaran.

3. Implikasi bagi Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pengaruh pada Pengambilan Keputusan
Locus of control yang lebih internal dapat menghasilkan keputusan yang lebih berani dan berbasis data, sementara *locus of control* eksternal dapat memperlambat pengambilan keputusan karena cenderung menunggu arahan dari pihak eksternal.

- Efisiensi dan Efektivitas

Pengelola keuangan dengan internal locus of control lebih termotivasi untuk bekerja secara efisien dan mencapai target anggaran karena mereka percaya pada kemampuan mereka sendiri untuk memengaruhi hasil.

4. Pengaruh Simultan

- Literasi Keuangan

Pengaruh *locus of control* terhadap kinerja keuangan daerah akan semakin signifikan jika pengelola memiliki literasi keuangan yang baik, sehingga mereka dapat memahami kompleksitas keuangan daerah.

- Kultur Organisasi

Lingkungan kerja yang mendukung akuntabilitas dapat memperkuat dampak positif internal locus of control terhadap kinerja keuangan.

Locus of control memengaruhi kinerja keuangan daerah melalui cara pengelola memahami dan bertindak atas kendali mereka terhadap pengelolaan anggaran. Internal locus of control cenderung mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik dengan mendorong tanggung jawab dan inovasi, sementara *external locus of control* dapat menjadi penghambat jika terlalu bergantung pada faktor di luar kendali organisasi. Oleh karena itu, penting bagi daerah untuk meningkatkan budaya kerja yang mendorong internal locus of control di antara pengelola keuangan untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah.

2.1.4.2 Aspek Locus of Control

Aspek-Aspek Locus Of Control menurut Rotter, dimensi locus of control terdiri atas enam yaitu:

- a. Dimensi pengakuan status, indikator locus of control mencakup kebutuhan untuk dihargai, ingin dianggap kompeten, dan kesuksesan dalam berkarya.

- b. Dimensi dominasi, indikator locus of control mencakup kebutuhan untuk mengontrol aktivitas orang lain dan kebutuhan untuk berkuasa.
- c. Dimensi ketidak tergantungan, indikator locus of control mencakup keyakinan diri dan menggantungkan pada diri sendiri/ usaha sendiri.
- d. Dimensi perlindungan-ketergantungan, indikator locus of control mencakup menghindari frustrasi dengan mencari perlindungan dan keamanan serta menggantungkan diri pada orang lain
- e. Dimensi cinta dan kasih sayang, indikator locus of control mencakup kebutuhan untuk dicintai serta kehangatan, perhatian, cinta dan kasih sayang.
- f. Dimensi kenyamanan fisik, indikator locus of control kebutuhan akan kepuasan fisik (menghindari sakit, mencari kesenangan jasmani).

2.1.4.3 Indikator Locus of Control

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Herleni & Tasman, 2019), dengan indikator sebagai berikut :

- 1. Kemampuan
- 2. Minat
- 3. Usaha

2.1.5 Kinerja Keuangan

2.1.5.1 Defenisi Kinerja Keuangan

Menurut Kuntadi *et al.* (2022) kinerja keuangan daerah merupakan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah untuk menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan asli milik daerah itu sendiri, dengan begitu dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan di suatu

daerah dan dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat akan adanya kebebasan penuh dalam menggunakan/ memanfaatkan dana-dana bagi kepentingan masyarakat daerah dalam batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam penelitian Karsana dan Suaryana (2017), pertanggungjawaban pemerintah atas segala kegiatan yang dilakukan disajikan dalam Laporan Keuangan yang terdiri dari 7 jenis laporan yaitu

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam konteks organisasi publik seperti Bapperida, untuk menilai keberhasilan pengelolaan anggaran daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, maka beberapa ahli telah merumuskan definisi kinerja keuangan sebagai berikut:

Van Horne dan Wachowicz (2005)

Kinerja keuangan adalah hasil dari pengelolaan aset, pendanaan, dan aktivitas operasi perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Pengukuran kinerja keuangan ini dilakukan untuk menilai efisiensi dan profitabilitas suatu entitas.

Fahmi (2012)

Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi melaksanakan keuangan secara baik dan sesuai dengan aturan pelaporan keuangan yang telah ditetapkan.

Helfert (1996)

Kinerja keuangan mengacu pada hasil yang dicapai oleh perusahaan melalui penggunaan sumber daya keuangan yang dimiliki secara efisien dan efektif, yang biasanya dievaluasi dengan analisis rasio keuangan.

Sutrisno (2017)

Kinerja keuangan adalah gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi dalam periode tertentu, termasuk aspek pendapatan, pengeluaran, dan efisiensi operasional, yang dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator keuangan tertentu.

Harahap (2010)

Kinerja keuangan adalah gambaran tentang pencapaian organisasi atau perusahaan yang terkait dengan kondisi keuangannya, yang diperoleh melalui laporan keuangan untuk mengevaluasi tingkat profitabilitas, solvabilitas, dan likuiditas.

Weston dan Copeland (1992)

Kinerja keuangan adalah hasil akhir yang dicapai suatu organisasi dalam pengelolaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti peningkatan nilai pemegang saham atau efisiensi anggaran.

Menurut Mardiasmo (2016) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan yaitu untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan

keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban publik, dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Sedangkan Sino *et al.* (2013) menjelaskan hasil analisis keuangan daerah digunakan sebagai total ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.1.5.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002):

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Halim, 2007):

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.1.5.3 Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Indikator kinerja keuangan pemerintah daerah meliputi (Mahsun, 2017 dalam Nurhaedah, 2022):

a. Indikator Masukan (*Inputs*)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

b. Indikator Proses (*Process*)

Indikator proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya, ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

c. Indikator Keluaran (*Output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik.

Misalnya, jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.

d. Indikator Hasil (*Outcome*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya, tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai.

e. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya, tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

Kinerja keuangan sebagai penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Hidayatulloh, 2020). Menurut (Yanti, 2019). Kinerja keuangan merupakan sebuah pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. Pada prinsipnya kinerja keuangan adalah prestasi atau hasil dalam menjalankan mengelola asset secara efektif dan efisien pada periode tertentu oleh manajemen periode tertentu.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Hidayatulloh, 2020), dengan indikator sebagai berikut :

1. Pertumbuhan usaha
2. Pertumbuhan pendapatan
3. Pertumbuhan modal
4. Penambahan Tenaga Kerja Setiap Tahun

5. Pertumbuhan pasar dan emasaran

2.2. Tinjauan Empiris

Berikut ini akan diuraikan kajian empiris dari beberapa hasil penelitian yang relevan dengan locus of control, literasi keuangan, inklusi keuangan, dan kinerja keuangan daerah, lengkap dengan penjelasan mengenai masing-masing penelitian:

Darmawan (2020), *Pengaruh Locus of Control terhadap Kinerja Pegawai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*. : Penelitian ini menemukan bahwa pegawai dengan internal locus of control memiliki kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Pegawai yang percaya bahwa hasil kerjanya bergantung pada usaha dan keputusan mereka cenderung lebih proaktif dalam menyelesaikan tugas dan mencari solusi atas masalah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan survei pada pegawai Bapperida di beberapa daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pegawai dengan internal locus of control lebih mampu mengelola anggaran dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Susanti & Priyono (2019), dalam penelitiannya tentang *Peran Literasi Keuangan dalam Memediasi Hubungan antara Locus of Control dan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan berfungsi sebagai mediator antara locus of control dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pegawai yang memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan cenderung lebih mampu mengimplementasikan kebijakan anggaran dengan baik. Dengan menggunakan metode kuantitatif, survei dilakukan di 10 kabupaten/kota. Hasilnya mengindikasikan bahwa literasi keuangan yang tinggi meningkatkan kemampuan pegawai dalam pengelolaan anggaran.

Wijayanti et al. (2021), *Hubungan Locus of Control dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Yogyakarta*. : Penelitian ini menemukan bahwa locus of control internal dan motivasi kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Pegawai yang merasa bahwa mereka memiliki kontrol atas pekerjaan mereka menunjukkan kinerja yang lebih baik. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada pegawai pemerintah daerah. Analisis regresi menunjukkan bahwa kombinasi locus of control dan motivasi kerja meningkatkan hasil keuangan daerah.

Hariyanto (2020). *Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Locus of Control sebagai Variabel Moderasi* Hasil: Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas meningkatkan pengaruh positif locus of control terhadap pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian menggunakan survei dan wawancara mendalam dengan pegawai di Bapperida. Hasil menunjukkan bahwa budaya organisasi yang baik memperkuat hubungan antara locus of control dan kinerja keuangan.

Amaliah et al. (2021), *Pengaruh Inklusi Keuangan Digital terhadap Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan* : Penelitian ini menemukan bahwa inklusi keuangan digital berkontribusi signifikan terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah. Pegawai dengan internal locus of control lebih mudah mengadopsi teknologi baru, yang berdampak positif pada kinerja keuangan. Data dikumpulkan dari instansi pemerintah daerah yang telah menerapkan sistem keuangan digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan teknologi meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran.

Rizki & Handayani (2023). *Adopsi E-Budgeting dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Daerah: Studi pada Pengelola Anggaran di Jawa Barat* Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa pegawai dengan internal locus of control lebih mampu mengimplementasikan sistem e-budgeting, yang meningkatkan kinerja keuangan daerah secara signifikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei kepada pengelola anggaran. Hasil analisis menunjukkan adopsi e-budgeting berbanding lurus dengan peningkatan efisiensi dan transparansi.

Gunawan et al. (2022). *Pengaruh Digitalisasi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Jawa Timur*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Digitalisasi keuangan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan daerah. Pegawai dengan internal locus of control menunjukkan tingkat adaptasi yang lebih tinggi terhadap teknologi digital. Penelitian ini menggunakan data dari pemerintah daerah yang menerapkan digitalisasi. Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi mempercepat pelaporan dan meningkatkan akuntabilitas.

Pratama et al. (2022), *Literasi Keuangan dan Adopsi Teknologi Finansial dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sumatera Utara*. Penelitian menemukan bahwa literasi keuangan yang baik meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengadopsi teknologi keuangan, berkontribusi pada pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif. Data diperoleh melalui survei di berbagai kabupaten/kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa literasi keuangan mendukung pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efisien.

Rahmadani & Yusuf (2023) *Efektivitas Sistem Keuangan Berbasis Teknologi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan sistem keuangan berbasis teknologi meningkatkan kinerja keuangan

daerah. Pegawai dengan internal locus of control lebih cepat beradaptasi dengan sistem baru. Metode penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa sistem teknologi baru mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Ardian et al. (2023), *Analisis Pengaruh Locus of Control dan Motivasi Kerja terhadap Indeks Kinerja Keuangan Daerah (IKKD)* Penelitian ini menyimpulkan bahwa locus of control internal memiliki pengaruh positif terhadap IKKD. Motivasi kerja juga berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Survei dilakukan di 15 daerah di Indonesia. Hasil analisis regresi menunjukkan adanya hubungan signifikan antara locus of control, motivasi kerja, dan kinerja keuangan daerah.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa internal locus of control, literasi keuangan yang tinggi, dan adopsi teknologi digital berkontribusi pada kinerja keuangan daerah yang lebih baik. Pengelola keuangan dengan pemahaman yang baik dan keyakinan terhadap kemampuan mereka dapat berperan aktif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Meskipun focus penelitian sama dengan penelitian ini, namun yang membedakan adalah bahwa penelitian ini mengkhususkan dalam konteks yang lebih spesifik, seperti pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kinerja keuangan di **Bapperida Sulawesi Barat**, yang merupakan konteks geografi yang lebih terbatas dan mungkin memiliki karakteristik unik. Penelitian ini menyertakan **inklusivitas keuangan** sebagai variabel tambahan dalam analisis, ini menambah dimensi baru yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian sebelumnya